



NEWSLETTER

ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(APHTN-HAN)

BIMTEK LEGAL DRAFTING PP APHTN-HAN KEBUT LAKUKAN RAPAT KOORDINASI



Terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan anggotanya dalam bidang akademik, PP APHTN-HAN adakan kembali Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting, gandeng kerjasama Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), rencana tersebut diawali dengan rapat koordinasi gabungan antara PP APHTN-HAN, MK, dan Kemenkumham secara daring. 5/7/2021.



Rapat koordinasi yang diselenggarakan secara daring, dibuka secara langsung oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (PusdiklatMK) Imam Margono. Dalam kesempatan tersebut Margono menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang luar biasa kepada para peserta rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Bimtek Legal Drafting yang di hadiri oleh Sekretaris Jendral (Sekjend) PP APHTN-HAN Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H. beserta jajarannya, dan Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham, yang akan diselenggarakan di PusdiklatMK beberapa minggu yang akan datang, secara daring mengingat pandemi belum berakhir. Kita dapat pastikan bahwa pelaksanaannya nanti akan kita lakukan daring seperti halnya Bimtek Hukum Acara MK yang lalu, pungkas Margono.



Dalam kesempatan yang sama merespon apresiasi PusdiklatMK, Sekjend PP APHTN-HAN, menyampaikan juga ucapan terimakasih karena kembali diberikan kepercayaan sebagai peserta dalam Bimtek yang sangat spesial. Bayu mengatakan spesialnya ini dikarenakan Bimtek kali ini dilaksanakan/terselenggara nantinya berkat kerjasama 2 lembaga Negara dan 1 asosiasi keilmuan, dan ini jarang sekali terjadi, imbuhnya. Diharapkan output dari kegiatan ini khususnya bagi anggota APPHTN-HAN yang saat ini tersebar di 29 Provinsi yang semuanya berstatus sebagai seorang dosen/pengajar, baik itu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Pendidikan dan pengajaran bidang keilmuan penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang wajib disetiap Fakultas Hukum, tentu adanya Bimtek ini pengetahuan yang diperoleh akan bermanfaat bagi pengajaran mereka di kampus masing-masing, untuk menciptakan perancang peraturan perundang-undangan yang handal nantinya. Selain itu juga dijelaskan oleh Bayu, dari keseluruhan anggota APHTN-HAN yang mencapai kurang lebih seribu anggota dari sabang sampai merauke ini rata-rata mereka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian sebagai Tenaga Ahli penyusun Peraturan Daerah (Perda, Perkada) di daerahnya masing-masing, sehingga kemampuan teori dan praktik yang terus di perbaharui ini akan sangat berguna nantinya menciptakan produk hukum yang baik dan konstitusional, Jelas Bayu.



Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, dalam rapat koordinasi Nuryanti Widyastuti, menambahkan perlu adanya penyesuaian kapasitas peserta jika kita ingin memperoleh pemahaman peserta yang baik dalam pemberian materi. Kami meminta pelaksanaan dibagi menjadi 4 angkatan jika jumlah yang disediakan 400 orang, dimana bimtek yang nantinya disampaikan bukan hanya sekedar ceramah materi, namun juga ada ujian praktik/post test, terang Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham. (RR).

Follow Us :